

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BOS merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan ini diartikan sebagai dana bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Semua sekolah dasar dan menengah pertama berhak mendapatkan dana BOS. Program BOS merupakan salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Melalui dana BOS, tidak boleh siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran atau pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Anak lulusan SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Sehingga tidak ada lagi tamatan SD atau sederajat dengan alasan karena mahal nya angsuran sekolah.

Penggunaan dana BOS yaitu untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku pelajaran serta buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan atau untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya yang menyangkut biaya di sekolah. Sehingga seharusnya seluruh anak bangsa Indonesia dapat menikmati pendidikan yang sangat layak. Tapi hal ini tidak sesuai kenyataannya, masih banyak anak bangsa yang putus sekolah padahal seharusnya segala kebutuhan sekolah sudah ada dari pemerintah yaitu melalui dana BOS.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian

program wajib sekolah sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 (Permendikbud 76/2014) secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Jika ada penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh pihak dari sekolah, maka sanksi yang diberikan adalah penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja), penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi, penerapan proses hukum dan pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

Penyelewengan dana BOS juga termasuk dalam kasus korupsi. Hal ini merupakan salah satu tindakan dalam kecurangan keuangan. Kecurangan

keuangan merupakan bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan Wilopo (2006) mengenai ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis yang berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan pada penelitian ini akan mencoba mengkaji mengenai pengaruh ketaatan aturan pelaporan keuangan, perilaku tidak etis dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan keuangan pada pengelolaan dana BOS. Laporan keuangan sangatlah penting dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini dikarenakan seringkali laporan keuangan merupakan bagian yang paling rentan dilakukan kecurangan termasuk pengelolaan dana BOS. Sehingga seorang kepala sekolah selaku ketua organisasi dalam lingkup sekolah harus melaksanakan aturan keuangan dengan benar. Aturan keuangan memberikan pedoman bagi manajemen bagaimana melakukan kegiatan keuangan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Komaruddin (1994;269), pengertian efektivitas itu sendiri adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan pengendalian internal menurut ICPA adalah Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan

dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (James, 1997:155). Menurut Weber (1999, p.49), pengendalian internal terdiri dari lima unsur / komponen yang saling berintegrasi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Oleh karena itu pengendalian internal dari kepala sekolah selaku ketua komite sekolah sangatlah penting agar tidak terjadinya penyelewengan dana sekolah terutama dana BOS sehingga tercipta transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan dana BOS. Penyelewengan dana BOS juga bisa dikarenakan akibat dari perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pihak komite sekolah.

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terhadap kasus kecenderungan kecurangan akuntansi mengenai pengelolaan dana BOS yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sahrani (2013) yaitu *Analysis Internal Control System Implementation Practices Fraud Trends Inoperating Schoolaid Fund* (BOS). Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang telah dilakukan terhadap 44 sekolah tingkat dasar, maka dapat diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien positif, penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien positif, aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien positif, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *faud* dana BOS dengan koefisien positif, serta pemantauan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien negatif.

Penelitian ini juga berdasarkan pada penelitian Wilopo (2006) yang berjudul Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia. Dimana diperoleh hasil bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Namun, kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk memadukan kedua penelitian tersebut, yaitu mengembangkan penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) serta menyesuaikan dengan objek penelitian yang dihadapi peneliti dengan bertepatan bantuan operasional sekolah serta sampel yang digunakan juga mencoba untuk meneliti di sekolah tingkat menengah pertama, sementara Sahrani (2013), melakukan penelitiannya di sekolah tingkat dasar. sehingga peneliti ingin mengangkat kasus pengaruh ketaatan aturan pelaporan keuangan, perilaku tidak etis, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan keuangan studi pada pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama di kabupaten Pamekasan.

Sementara itu seberapa tertarik peneliti untuk melakukan penelitian ini juga di dasari oleh banyaknya wacana dan pemberitaan tentang penyelewengan dana BOS yang mana banyak terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia. Salah satunya Sahrani (2013) mengungkapkan dalam pengelolaan dana BOS masih adanya kasus seperti dugaan *mark up* jumlah siswa di suatu kabupaten yang mana pemberitaan ini di dapat oleh penelitian yang dilakukan LSM anti korupsi

setempat. Sementara itu di Kabupaten Pamekasan seperti yang dimuat di surat kabar online formatnews - Pamekasan, (10/5) mengungkapkan "Sebab selama ini kami banyak menerima laporan, baik secara lisan ataupun tertulis tentang adanya dugaan penyimpangan bantuan dana BOS tersebut" dan "Ada juga yang mengalokasikan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga banyak siswa yang dimintai sumbangan uang pendidikan," ujar Makmun selaku Ketua Komisi DPRD Pamekasan (*Sumber: formatnews.com*). Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat kasus ini di kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh ketaatan aturan pelaporan keuangan, perilaku tidak etis, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan keuangan pada pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Pertama sederajat di kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketaatan aturan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan keuangan?
2. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan keuangan?
3. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu dapat mengetahui hubungan antara ketaatan aturan pelaporan keuangan, perilaku tidak etis dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan keuangan pada pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Melalui hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang hubungan antara ketaatan aturan pelaporan keuangan, perilaku tidak etis dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan keuangan
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih berupa sumbangan konseptual bagi peneliti berikutnya maupun para mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan BOS dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dan pembahasan disusun dengan pembahasan lima bab, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang jenis dan sumber data, populasi dan metode penentuan sampel, variabel dan definisi operasional penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas isi pokok dari penelitian yang dilakukan diantaranya: deskripsi objek penelitian, analisis data, pembahasan, hingga hasil analisis melalui hasil pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi penelitian berikutnya.